

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1985). From Intention to Actions: A Theory Of Planned Behavior. In J. K. Beckman, *Action Control: From Cognition To Behavior*. Berlin: Springer-Verlag.
- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50 (2):179-211.
- Akbar, R. (2012, November 29). Institutional Isomorphism dalam Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik di Indonesia. *Majalah EBNEWS Edisi 13*.
- Al Weshah, M. A. (2013). Transparency in Application of Scientific Principles and Rules in Government Procurement to Improve Effectiveness of Service and Cost Reduction in The Public Sector. *Far East Journal of Psychology and Business* , Vol 10 (3):9-26.
- Anfujatin. (2016). Kinerja Pemerintah Analisis Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Rendahnya Penyerapan Anggaran Belanja Pada SKPD Kabupaten Tuban. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol 14(1):1-14.
- Bappenas. (2011). *Laporan Identifikasi Permasalahan Penyerapan Anggaran Tahun 2011 di Enam Kementerian/Lembaga dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah di Dua Provinsi*. Jakarta: Bappenas.
- Bawono, I. R., & Novelsyah, M. (2011). *Tata Cara Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Bendahara pada SKPD dan SKPKD*. Salemba Empat.
- Carpenter, T. D., & Reimers., J. L. (2005). Unethical and Fraudulent Financial Reporting: Applying The Theory Of Planned Behavior. *Journal of Business Ethics* , 60 (2): 115-129.
- DiMaggio, P., & Powell, W. (1983). Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organization Fields. *American Sociological Review*, 48, 147-160.
- Fishbein, M. & Ajzen, I. (1975). *Belief Attitude Intention And Behavior* . California: Addison Wesley.



R. E., & Reed, a. (1983). Stockholders and Stakeholders: A New perspective on Corporate Governance. *Californian Management Review*, vol.25 No.2 pp.88-106.

- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Glenngard, A.H. & T. M. Maina. (2007). Reversing The Trend of Weak Policy Implementation in The Kenyan Health Sector? A Study of Budget Allocation and Spending of Health Resources Versus Set Priorities. *Health Research and System* , 5, 3. BioMed
- Halim, A. (2014). *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Herryanto, H. (2012). Faktor-Faktor yang mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja pada Satuan Kerja Lembaga/Kementerian di Wilayah Jakarta. *Tesis*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Kenis, I. (1979). Effects of Budgetary Goal Characteristics on Managerial Attitudes and Performance . *The Accounting Review*, Vol. 54, No. 4 , pp. 707-721.
- Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah.
- Kuangan, K. (2017 , December 21). Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah.
- Kuswoyo, I. D. (2011). Faktor-faktor Penyebab Penumpukan Anggaran Belanja di akhir Tahun Anggaran pada Satuan Kerja di Wilayah KPPN Kediri. *Tesis*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada.
- Ledy S. Gagola, Jullie J. Sondakh, Jessy D.L. Warongan. (2016) Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Apbd) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud. <https://media.neliti.com/media/publications/65068-ID-analisis-faktor-faktor-yang-mempengaruhi.pdf>
- Love, P. E., Davis, P. R., Edwards, D. J., & Buccarini., D. (2008). Uncertainty Avoidance: Public Sector Clients and Procurement Selection. *International Journal of Public Sector Management*, 21(7):753-776.
- Mantiri, R., Rumat, V. A., & Kawung, G. M. (2018). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kompetensi Pegawai Dan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Anggaran Pada Universitas Sam Ratulangi Manado . *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah* , Vol.19(7):1-17.

no. (2002). *Pengawasan, Pengendalian, dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Yogyakarta: ANDI.

no. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. . Yogyakarta: Andi.



- Miliasih. (2012). *Analisis Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga TA 2010 di Wilayah Pembayaran KPPN*.
- Miller, Gerald J. 2012. *Government Budgeting and Financial Management in Practice; Logics to Make Sense of Ambiguity*. CRC Press Taylor & Francis Group
- Murtini. (2009). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Penyerapan Realisasi Anggaran Departemen Perindustrian Republik Indonesia*. Jakarta: Thesis Universitas Bina Nusantara.
- Murwanto, R. (2010). *Materi Pokok Pengelolaan Keuangan Negara*. Jakarta: BPPK.
- Nawawi. (2010). *Perencanaan SDM untuk Organisasi Profit yang Kompetitif*.
- Nur Herawati dan Hadi Sasana. 2013. Analisis pengaruh pendidikan, upah pengalaman kerja, jenis kelamin dan umur terhadap produktivitas tenaga kerja industri shuttlecock Kota Tegal. *Diponegoro Journal Of Economics* Volume 2, Nomor 4, Tahun 2013, Halaman 1-8
- Nurofik. (2013). Pengaruh Sikap, Norma Subyektif, dan Kontrol Perilaku pada Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, Vol. 24(1):23-33.
- Oxborne, D., & Gaebler, T. (1995). Reinventing government. *Journal of Leisure Research*, 27(3):302.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka .
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- Pilcher, R. A. (2007). *Preliminary empirical evidence of institutional isomorphism in local authorities*. Australia: In Annual Meeting of the International Association for Business and Society, Curtin University of Technology.
- P. A. (2013). Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Satuan Kerja Lingkup Pembayaran KPPN Blitar. *Jurnal*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.



- Sekaran, Uma (2016). *Research Methods for Business A Skill-Building Approach*. Seventh edition. Chichester, West Sussex, United Kingdom: John Wiley & Sons.
- Short, J. L. (2013). Self-Regulation in the Regulatory Void: ‘‘Blue Moon’’ or ‘‘Bad Moon’’? *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, 649 (1), 22-34.
- Sinaga, E. J. (2016). Analisis Rendahnya Penyerapan Anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah . *Recthsvinding* , Vol 5(2):261-274.
- Susanto, H. (2006). Mekanisme Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, Dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Sosial & Humaniora*, Vol. 02 No. 01.
- Syarifuddin. (2003 , Agustus). *Model-Model Anggaran Pada Organisasi Sektor Publik dan Perkembangannya*. Seminar Bulanan Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Wadi, M. I., Herwanti, R. T., & Husnan, L. H. (2016). Causes of Delays in Budget Absorption as The Development of Good Governance On Deconcentration And Co-Administration Task Budget (A Case Study at The Work Unit Of DKP-NTB Province). *The Indonesian Accounting Review*, Vol.6(2):171-180.
- Yustika, A. E. (2012). *Perekonomian Indonesia: Catatan Dari Luar Pagar*. Malang : Bayumedia Publishing.
- Zulaikah, B., & Burhany, D. I. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penumpukan Penyerapan Anggaran Pada Triwulan Iv Di Kota Cimahi. *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar*, Vol 10 No 1.



Lampiran I Kuesioner Penelitian

KUESIONER PENELITIAN

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYERAPAN ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

Yth. Bapak/Ibu Responden

Kami memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk meluangkan waktu sejenak guna mengisi kuesioner ini. Kuesioner ini dibuat untuk meneliti “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara”. Informasi Bapak/Ibu sangat berguna bagi penelitian ini, karena Bapak/Ibu adalah orang yang tepat untuk mengutarakan pengalaman dan pendapat mengenai hal ini. Kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjawab pertanyaan dengan jujur dan benar.

Sesuai dengan kode etik penelitian, jawaban Bapak/Ibu akan Kami jaga kerahasiaannya. Atas waktu dan kerja sama Bapak/Ibu Anda ucapkan Terimakasih.

Peneliti

JEMI DUMA
A042182012



A. Identitas Responden

Petunjuk A: Isilah titik-titik dibawah ini.

Nama :

JenisKelamin : Laki-laki / Perempuan

Jabatan : (PPK, PPTK, PP SPM dan Bendahara Pengeluaran)

Lama Bekerja : Tahun

Pendidikan : (S3, S2, S1, Diploma, SLTA, Lainnya)*

Bid. Pendidikan :

Satuan Kerja :

Alamat Email* :

Petunjuk B:

Berilah tanda silang (X) pada pilihan jawaban yang sesuai dengan kondisi yang terjadi di OPD/SKPD dimana Saudara bekerja berdasarkan keterangan jawaban pilihan seperti di bawah ini:

Keterangan I:

STS : Sangat Tidak Setuju
TS : Tidak Setuju
KS : Kurang Setuju
S : Setuju
SS : Sangat Setuju

Keterangan II:

TP : Tidak Pernah
P : Pernah
KK : Kadang-kadang
S : Sering
L : Selalu



1. Penyerapan Anggaran (Y)

| No | Pernyataan | SS | S | KS | S | STS |
|----|---|----|---|----|---|-----|
| 1. | Rerata tingkat penyerapan anggaran SKPD setiap tahun lebih besar dari 90% | | | | | |
| 2. | Tingkat penyerapan anggaran meningkat dari tahun sebelumnya | | | | | |
| 3. | Realisasi anggaran selalu sinkron dengan anggaran yang telah disusun sebelumnya | | | | | |
| 4. | Penyusunan dan Perubahan Anggaran melibatkan semua perangkat SKPD | | | | | |
| 5. | Prosedur pencairan anggaran lebih simpel dari tahun sebelumnya | | | | | |

2. Dokumen Perencanaan (X1)

| No | Pernyataan | SS | S | KS | S | STS |
|----|---|----|---|----|---|-----|
| 1 | Proses perencanaan selalu melibatkan pemangku kepentingan (Desa/Kelurahan. Kecamatan, SKPD, DPRD) | | | | | |
| 2 | PEMKAB selalu mensosialisasikan program dan kegiatan strategis tahunan kepada pemangku kepentingan (Desa/Kelurahan. Kecamatan, SKPD, DPRD) sebelum dilakukan Musrenbang | | | | | |
| 3 | Penyusunan program dan kegiatan tahun berkenan selalu mempertimbangkan capaian tahun sebelumnya | | | | | |
| 4 | RKPD selalu disusun berdasarkan RPJMD | | | | | |
| 5 | Pembahasan RAPBD dan APBD selalu tepat waktu sebagaimana yang diamanahkan pemerintah | | | | | |

3. Regulasi (X2)

| No | Pernyataan | SS | S | KS | S | STS |
|----|---|----|---|----|---|-----|
| 1. | Pengguna anggaran memahami regulasi mengenai keuangan daerah | | | | | |
| | Pejabat SKPD/OPD selalu memotivasi untuk mempelajari regulasi keuangan daerah | | | | | |
| | Meningkatkan fleksibilitas perubahan regulasi (kecepatan perubahan regulasi) | | | | | |



| No | Pernyataan | SS | S | KS | S | STS |
|----|---|----|---|----|---|-----|
| 4. | Pengguna anggaran patuh terhadap regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah dan PEMDA | | | | | |
| 5. | Aparat pengawas internal pemerintah selalu mendampingi selama proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran | | | | | |

4. Kompetensi Sumber Daya Manusia (X3)

| No | Pernyataan | TP | P | KK | SR | SL |
|----|---|----|---|----|----|----|
| 1. | SDM pengelola anggaran memiliki pengetahuan yang sesuai dengan bidang tugasnya | | | | | |
| 2. | PEMDA selalu memberikan kesempatan kepada ASN untuk mengikuti DIKLAT keuangan daerah | | | | | |
| 3. | Setiap ASN memiliki perilaku disiplin dalam melaksanakan tugas | | | | | |
| 4. | Setiap ASN ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan keahliannya | | | | | |
| 5. | Setiap ASN memiliki kemampuan dalam mengkomunikasikan data dan informasi keuangan kepada pimpinan dan rekan kerja | | | | | |

5. Dokumen Pengadaan (X4)

| No | Pernyataan | TP | P | KK | SR | SL |
|----|--|----|---|----|----|----|
| 1. | PEMDA memiliki Harga Perkiraan Sendiri (HPS) | | | | | |
| 2. | HPS ditentukan berdasarkan keahlian dan melalui survei pasar | | | | | |
| 3. | PEMDA selalu mempublikasikan rencana pengadaan | | | | | |
| 4. | Seluruh proses dalam rencana pengadaan dilakukan secara transparan | | | | | |
| 5. | Rencana kegiatan dilengkapi dengan TOR, AB dan data pendukung | | | | | |



6. Uang Persediaan (X5)

| No | Pernyataan | TP | P | KK | SR | SL |
|----|--|----|---|----|----|----|
| 1. | Penyediaan Uang Persediaan (UP) selalu sesuai dengan kebutuhan | | | | | |
| 2. | Uang Persediaan (UP) selalu dialokasikan sesuai dengan peruntukannya | | | | | |
| 3. | Mekanisme pencairan Uang Persediaan (UP) mudah | | | | | |
| 4. | Kelebihan UP/TUP selalu disetorkan ke Bendahara Daerah | | | | | |
| 5. | Uang Persediaan (UP) selalu direalisasikan tepat waktu | | | | | |

Terima Kasih

